

## **Analisis Manajemen Pemerataan Sistem Pendidikan di Kota Tangerang Selatan sebagai Upaya Pencegahan Kasus Korupsi**

**Khanaya<sup>1</sup>, Jeanne Evelina Setiawan<sup>1\*</sup>, Ladya Azka<sup>1</sup>, Syifa Ardena<sup>1</sup>, Leoni Yesisca<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Manajemen, Universitas Multimedia Nusantara

Jl. Scientia Boulevard, Gading Serpong, Banten 15810

Email: [jeanne.eve24@gmail.com](mailto:jeanne.eve24@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Equal distribution of education in the city of South Tangerang is an issue that requires special attention, which must be resolved immediately as an effort to improve the quality of Human Resources (HR). Educational equality is an effort to ensure that every individual has the same opportunity to gain access to and adequate quality of education. However, when the issue of corruption arises in the context of educational equality, this shows that resources that should be used to improve access and quality of education are often misused for personal gain or that of a particular group. This research aims to create a systematic, factually accurate picture and the relationship between the phenomena that occur. The data obtained during this research will be processed and further processed using existing theories. In this research, we used qualitative methods in the form of descriptive data supported by journals and information from official websites. From the research that has been carried out, it can be concluded that the distribution of the education system in the city of South Tangerang is not yet completely equal. The lack of equal distribution of education in the city of South Tangerang can have an impact on the quality of education and the quality of education for all students*

**Keywords:** *Quality of education, Prevention of corruption, Equal distribution of education*

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan adalah hal pokok yang akan menopang kemajuan suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kualitas dan sistem pendidikan yang ada. Tanpa pendidikan, suatu negara akan jauh tertinggal dari negara lain (Sujarwo, 2013). Lembaga pendidikan dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat (Sewang, 2015). Banyak perhatian khusus diarahkan kepada perkembangan dan kemajuan pendidikan guna meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula (Mardhiyah, Aldriani, Chitta, & Zulfikar, 2021). Hal ini mendorong seluruh lapisan masyarakat begitu memperhatikan perkembangan dunia pendidikan.

Sistem pendidikan di Indonesia mewajibkan untuk sekolah sembilan tahun di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) gratis yang sudah disediakan oleh pemerintah (Marzuki, 2012). Kebijakan pendanaan yang disediakan oleh pemerintah dikenal sebagai dana biaya operasional sekolah (BOS), pendanaan ini yang menjalankan aktivitas akademik di sekolah. Permendiknas juga membuat kebijakan untuk mencapai beberapa faktor mengenai pendidikan, yaitu peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Hal ini juga akan membantu dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia (Undang-Undang Sisdiknas, 2003).

Sistem Pendidikan yang selama ini berlangsung di Indonesia dapat dikatakan kurang merata hingga tidak memberikan dampak dan perubahan yang signifikan terhadap pola pikir masyarakat Indonesia sejak jaman dahulu hingga saat ini. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan

yang umum terjadi di beberapa institusi Pendidikan, dimana institusi Pendidikan ini lebih mementingkan keuntungan ekonomi daripada meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Hal ini dapat memberikan dampak buruk bagi siswa dan masa depannya, karena dapat mengakibatkan tidak meratanya sistem Pendidikan yang ada di seluruh Indonesia (Liviana, 2015). Menurut Report 2016 kualitas pendidikan Indonesia berada di urutan kelima dari bawah dari 14 negara berkembang lainnya mengenai mutu pendidikan (Yunus, 2018) dan World Population Review Pada mempublikasikan pada tahun 2021, Indonesia berada di peringkat ke-54 dari total 78 negara (Larasat, 2022).

Majunya pendidikan dan kualitasnya merupakan salah satu faktor suatu bangsa bisa dikatakan maju. Maka dari itu, Indonesia terus mengembangkan kualitas pendidikan dengan menerapkan kebijakan pendidikan pelajar karakter. Pendidikan karakter sendiri pada dasarnya bertujuan mendorong lahirnya manusia yang memiliki kepribadian menarik, beretika, bersahaja, jujur, cerdas, peduli, dan tangguh. Tumbuh dan berkembangnya karakter yang baik akan mendorong peserta didik tumbuh dengan kapasitas dan komitmen untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar dan memiliki tujuan hidup (Hasanah, 2013). Mengembangkan kualitas pendidikan, diperlukan pembaharuan dan pemerataan pendidikan guna memperbaiki permasalahan kualitas pendidikan supaya tidak semakin kompleks. Kembali lagi pada kenyataan, bahwa sistem pendidikan yang ada belum berhasil sesuai yang diinginkan, baik dalam hal pemerataan pendidikan, fasilitas, tenaga pendidik. Sebab hal itu menjadi masalah yang mendesak dalam memahami pembaharuan dan pemerataan pendidikan. (Lestari)

Hal yang memicu kurangnya kualitas pendidikan di Indonesia menyebabkan masih banyaknya aksi korupsi yang terjadi di beberapa sekolah. Tindak korupsi sering kali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam politik namun dalam bidang pendidikan pun ada. Seperti yang kita ketahui bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang menyimpang dan memiliki dasar pemikiran bahwa sesuatu adalah miliknya. Perlu untuk diketahui bahwa tindakan korupsi sudah melanggar etika sebagai manusia karena perbuatan serakah dari pelaku korupsi.

Tindakan korupsi di sekolah seperti membeli bangku, menurunkan kualitas pendidikan. Hal inilah yang menjadikan pendidikan di Indonesia turun dan tidak berkembang. Kasus lainnya adalah menyogok untuk mendapatkan nilai lebih sehingga bisa diluluskan. Oleh karena itu korupsi memerlukan jalan keluar yang efektif dan komprehensif. Salah satu yang harus di dorong adalah keterlibatan aparat penegak hukum, penyelenggara pendidikan, masyarakat, hingga pemuda dalam upaya pencegahan korupsi. Pemuda memiliki manfaat yang luar biasa karena mengingat karakteristik pemuda yang masih memiliki semangat yang tinggi, sehingga mampu melakukan perannya untuk berusaha menciptakan kegiatan anti korupsi dengan baik.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diberikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh antara sistem pendidikan Indonesia terhadap pemerataan sistem pendidikan di Kota Tangerang Selatan dan bagaimana upaya pemerataan sistem pendidikan di Kota Tangerang Selatan dapat mencegah terjadinya kasus korupsi. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah masyarakat mengetahui berapa tinggi tingkat korupsi yang terjadi dalam bidang pendidikan dan menghimbau masyarakat seberapa besar masyarakat mengetahui apakah pendidikan antikorupsi bisa mengurangi tingkat korupsi dalam bidang pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam usaha untuk pemerataan sistem Pendidikan untuk pencegahan kasus korupsi di kota Tangerang Selatan.

#### Pemerataan Pendidikan

Sistem pendidikan nasional dalam masyarakat demokratis bertujuan untuk mengembangkan budaya demokratis. Pendekatan demokratis terhadap pendidikan tidak menyangkal

perbedaan yang melekat pada kecerdasan manusia, melainkan berupaya memberikan kes-empatan pendidikan yang sama bagi semua individu berdasarkan kemampuan dan bakat mereka yang unik. Pendekatan ini memungkinkan semua orang untuk mengakses pendidikan berkualitas tinggi, terlepas dari latar belakang atau keadaan mereka. Pada intinya, sistem pendidikan nasional yang demokratis berusaha untuk menciptakan lapangan bermain yang setara di mana semua anggota masyarakat dapat mengembangkan potensi mereka dan ber-kontribusi untuk kebaikan bersama (Soyomukti, 2010).

Pendidikan nasional di Indonesia dipandu oleh visi untuk membangun institusi sosial yang kuat dan mempunyai pengaruh yang memberdayakan semua warga negara untuk menjadi individu yang kompeten dan proaktif. Visi ini bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan dunia yang terus berkembang dengan mendorong perkembangan intelektual, sosial, dan emosional mereka. Dengan memperkuat sistem pen-didikan nasional, pemerintah berupaya menciptakan masyarakat yang lebih setara dan adil di mana semua anggotanya memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai visi berikut:

1. Mengupayakan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bansa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pem-budayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan-prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hakim, 2016).

### **Pendidikan Antikorupsi**

Korupsi menjadi masalah yang meluas di Indonesia, dan sering kali dianggap sebagai praktik yang lumrah oleh masyarakat. Penerimaan budaya terhadap korupsi ini sebagian disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan dampak negatifnya. Meskipun penegakan hukum memainkan peran penting dalam pemberantasan korupsi, na-mun sama pentingnya untuk melibatkan masyarakat dalam upaya ini. Untuk itu, buku "Pen-didikan Antikorupsi: Kajian, Teori dan Praktik Antikorupsi" berfungsi sebagai alat pendidikan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran yang lebih besar tentang korupsi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah dan memberantasnya. Buku ini hadir se-bagai upaya preventif untuk mengatasi akar permasalahan korupsi dan menumbuhkan budaya integritas dan akuntabilitas di Indonesia (Rosikah, 2022).

### **METODE**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam analisis ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Lexy J. moleong, 2006). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari jurnal-jurnal serta informasi dari website resmi dan terpercaya. Analisis ini dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan pengum-pulan data. Data yang diperoleh selama melakukan penelitian ini akan diolah serta diproses lebih lanjut dengan teori-teori yang ada. Sumber data seperti jurnal, dan website yang didapat dari penelitian

menjadi pendukung proses pembuatan artikel ilmiah ini. Penelitian ini dimulai dengan tahapan pengumpulan data melalui observasi, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan hasil penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah pemerataan pendidikan di Indonesia guna meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Hal yang memicu kurangnya kualitas pendidikan di Indonesia disebabkan masih banyaknya aksi korupsi yang terjadi di beberapa sekolah. Oleh karena itu korupsi memerlukan jalan keluar yang efektif dan komprehensif. Pemuda memiliki manfaat yang luar biasa karena mengingat karakteristik pemuda yang masih memiliki semangat yang tinggi, sehingga mampu melakukan perannya untuk berusaha menciptakan kegiatan anti korupsi dengan baik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Pemerataan pendidikan di kota Tangerang Selatan menjadi sebuah isu yang memerlukan perhatian khusus, yang harus segera diselesaikan sebagai upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pemerataan sistem pendidikan di kota Tangerang Selatan masih belum memadai karena terjadinya ketimpangan jumlah alumni di SD negeri dan SMP negeri. Diketahui, jumlah SMP negeri di kota Tangerang Selatan hanya 15% dari jumlah SD negeri, menyebabkan kurangnya keterserapan alumni-alumni SD negeri di SMP negeri. Dengan hal ini banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta dengan biaya yang cukup mahal bahkan ada yang memilih untuk putus sekolah (metro.sindonews.com, 2023).

Pemerataan pendidikan sebagai upaya untuk memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses dan kualitas pendidikan yang layak. Namun, ketika isu korupsi muncul dalam konteks pemerataan pendidikan, hal ini menunjukkan bahwa sumber daya yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, seringkali disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau suatu kelompok tertentu. Salah satu kasus korupsi mantan kepala SMPN 17 Tangerang Selatan menggelapkan sejumlah dana Pro-gram Indonesia Pintar (PIP) yang merugikan 1.077 siswa dengan kerugian negara sebesar Rp 699 juta. (newsdetik.com, 2023). Ada juga faktor pendukung yang menyebabkan ketidakmerataan pendidikan di Tangerang Selatan.

### **Kesenjangan Infrastruktur dan Fasilitas**

Persebaran sekolah yang tidak merata, dengan sekolah negeri yang terkonsentrasi di pusat kota dan sekolah swasta di area perumahan elit (kompas.id, 2023). Fasilitas di sekolah negeri tidak memadai dikarenakan terjadinya korupsi dana BOS. Pelaku memanipulasi dana seolah-olah sudah digunakan untuk keperluan sekolah, namun kenyataannya untuk kepentingan pribadi (detik.com, 2023).

### **Kurangnya Pendidik yang Berkualitas**

Kota Tangerang Selatan terancam akan mengalami kekurangan tenaga pengajar di sejumlah sekolah khusus (SKh) dikarenakan tidak adanya SKh negeri. Hal ini, menyusul adanya peraturannya yang dikeluarkan pemerintah pusat, terkait penarikan guru berstatus ASN yang mengajar di sekolah swasta ke sekolah-sekolah negeri milik pemerintah (pikiranrakyat.com, 2019)

### **Kurangnya Manajemen dan Tata Kelola Pendidikan**

Rendahnya pengawasan pemerintah terhadap tata kelola pendidikan di Tangerang Selatan menyebabkan terjadinya kasus buku Lembar Kerja Siswa (LKS) yang mencantumkan dua barang terlarang (ganja dan kokain) sebagai materi pembelajaran. Hal ini jelas bertentangan dengan

Permendikbud Nomor 8/2016 yang menjelaskan bahwa buku LKS tidak boleh diper-jualbelikan. (sindonews.com, 2016). Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Tangerang Selatan dengan melakukan kebijakan dan program demi peningkatan kualitas pendidikan di wilayahnya. Menargetkan indikator makro untuk upaya pendidikan dasar wajib 12 tahun, untuk memenuhi target undang-undang sistem pendidikan nasional maka alokasi anggaran diharapkan mencapai 20% dari total APBD. Saat ini, sudah terlampaui dari 20% bahkan men-dekati 26%. Selain itu, meluncurkan program bantuan beasiswa bagi putra dan putri yang tidak diterima di sekolah negeri dan ditanggung dalam APBD (Benjamin, 2023). Pemkot Tangsel mempunyai program beasiswa SMP swasta untuk mengakomodir mahasiswa yang tidak lolos di SMP negeri karena zonasi dan untuk siswa yang tergolong dalam keluarga tidak mampu. Beasiswa sekolah ini mengalami peningkatan dari 2.500 menjadi 5.000 anak (detiknews.com, 2023).

Pendidikan kota Tangsel menggelar seminar mengenai “Peningkatan kompetensi guru dalam menjawab tantangan dan isu pendidikan di Tangerang Selatan” yang dimoderatori oleh Edi Suharsongko yang menjabat sebagai Kasi Penmad Kemenag Tangsel (KemenagTangsel, 2023). Hal ini dilakukan untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan pengembangan karakter dan kemampuan anak terutama bagi para guru kepada anak didik.

Sistem zonasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk penerimaan peserta baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah menyebabkan terbatasnya pergerakan siswa dan akan memusatkan pada fasilitas pendidikan yang berada di area domisili para siswa. Hal ini menunjukkan bahwa persebaran fasilitas pendidikan dan jumlah peserta pendidik di kota Tangerang Selatan memiliki persebaran yang merata (Iskandar, 2019). Sistem pendidikan memiliki peran kunci dalam pemerataan pendidikan di Indonesia, dengan menyediakan akses yang adil dan kesempatan yang sama bagi semua siswa, sistem pendidikan dapat mengurangi kesenjangan dalam pendidikan. Ini melibatkan pendanaan yang memadai untuk sekolah, pelatihan guru yang berkualitas. Sistem pendidikan Indonesia yang baik dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sehingga hal ini dapat mendorong pertumbuhan pendidikan di kota Tangerang Selatan.

Pemerataan sistem pendidikan di kota Tangerang Selatan dapat berperan dalam mencegah kasus korupsi dengan menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan transparan. Ini meliputi tersedianya akses yang sama untuk semua individu tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial, serta mendorong pengelolaan dana dan sumber daya pendidikan, dengan menyediakan pendidikan yang berkualitas termasuk pendidikan karakter yang mengutamakan nilai-nilai seperti kejujuran dan tanggung jawab. Sistem pendidikan di kota Tangerang Selatan akan lebih cenderung menghasilkan individu yang berkualitas dan tidak rentan terhadap praktik korupsi.

### **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan di Kota Tangerang Selatan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan manajerial. Ketimpangan jumlah lembaga pendidikan antara jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi akses pendidikan. Jumlah SMP negeri yang hanya sekitar 15% dari jumlah SD negeri menyebabkan tidak seluruh lulusan SD negeri dapat tertampung di SMP negeri. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap sekolah swasta yang umumnya memerlukan biaya pendidikan lebih tinggi. Bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan hambatan akses pendidikan bahkan risiko putus sekolah. Situasi ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lembaga pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan sistem pendidikan dalam menjamin keberlanjutan akses pendidikan bagi seluruh murid.



Selain persoalan jumlah lembaga pendidikan, kesenjangan infrastruktur dan fasilitas pendidikan juga menjadi faktor yang memperkuat ketidakmerataan pendidikan. Persebaran sekolah negeri yang cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu menyebabkan sebagian wilayah memiliki akses pendidikan yang lebih terbatas. Di sisi lain, sekolah swasta sering berkembang di kawasan permukiman dengan tingkat ekonomi yang relatif tinggi. Ketimpangan ini berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antara murid yang memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai dan murid yang berada pada wilayah dengan sarana pendidikan yang terbatas. Permasalahan ini semakin kompleks ketika pengelolaan dana pendidikan tidak berjalan secara optimal. Kasus penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah maupun program bantuan pendidikan menunjukkan bahwa praktik korupsi dapat secara langsung memengaruhi kualitas fasilitas pendidikan yang seharusnya digunakan untuk menunjang proses pembelajaran.

Permasalahan lain yang turut memengaruhi pemerataan pendidikan adalah ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas. Kekurangan guru pada beberapa jenis sekolah, terutama sekolah khusus, menunjukkan bahwa distribusi tenaga pendidik belum sepenuhnya merata. Kebijakan penarikan guru berstatus aparatur sipil negara dari sekolah swasta ke sekolah negeri juga berpotensi menimbulkan kekosongan tenaga pengajar pada lembaga pendidikan tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sekolah, tetapi juga berkaitan dengan distribusi sumber daya manusia pendidikan yang memadai. Tanpa ketersediaan guru yang berkualitas dan merata, proses pembelajaran sulit mencapai standar kualitas yang diharapkan.

Selain faktor infrastruktur dan sumber daya manusia, tata kelola pendidikan juga menjadi aspek penting dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Kasus penggunaan bahan ajar yang tidak sesuai dengan ketentuan serta lemahnya pengawasan terhadap distribusi buku pembelajaran menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan pendidikan. Tata kelola pendidikan yang tidak transparan dan tidak akuntabel berpotensi menimbulkan berbagai penyimpangan yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan dan pengelolaan pendidikan menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Di sisi lain, pemerintah Kota Tangerang Selatan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemerataan pendidikan melalui kebijakan dan program pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bahkan telah melampaui ketentuan minimal dua puluh persen sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan pendidikan nasional. Peningkatan anggaran tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan pendidikan. Selain itu, program beasiswa bagi murid yang tidak diterima di sekolah negeri juga menjadi salah satu strategi untuk mengurangi hambatan akses pendidikan, khususnya bagi murid dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

Program beasiswa bagi murid yang bersekolah di SMP swasta menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk memastikan bahwa murid tetap dapat melanjutkan pendidikan meskipun tidak diterima di sekolah negeri. Peningkatan jumlah penerima beasiswa menunjukkan adanya upaya perluasan akses pendidikan bagi masyarakat. Kebijakan ini menjadi bentuk intervensi pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pendidikan bagi murid yang terdampak keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai strategi pemerataan kesempatan pendidikan.

Selain kebijakan pendanaan, peningkatan kompetensi guru juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Kegiatan seminar dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menunjukkan upaya untuk meningkatkan kapasitas

profesional guru dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan. Peningkatan kompetensi guru diharapkan dapat mendukung terciptanya proses pembelajaran yang lebih berkualitas sehingga berdampak pada peningkatan kualitas hasil belajar murid.

Kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan murid baru juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mendorong pemerataan pendidikan. Sistem ini dirancang untuk memberikan kesempatan yang lebih adil bagi murid untuk mengakses sekolah yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Dengan sistem zonasi, diharapkan tidak terjadi konsentrasi murid pada sekolah tertentu saja, sehingga distribusi murid dapat lebih merata di berbagai sekolah. Namun demikian, implementasi sistem zonasi juga memerlukan dukungan pemerataan kualitas sekolah agar tidak menimbulkan persepsi adanya perbedaan kualitas pendidikan antarwilayah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan di Kota Tangerang Selatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari ketersediaan lembaga pendidikan, distribusi tenaga pendidik, kualitas tata kelola pendidikan, hingga kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung akses pendidikan. Upaya peningkatan pemerataan pendidikan memerlukan pendekatan yang komprehensif yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fasilitas pendidikan, tetapi juga pada penguatan sistem pengelolaan pendidikan yang transparan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta penyediaan dukungan kebijakan yang berpihak pada akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, pemerataan pendidikan dapat menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pembangunan pendidikan yang berkelanjutan di Kota Tangerang Selatan..

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan di Kota Tangerang Selatan masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan keterbatasan akses, ketimpangan infrastruktur pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik, serta tata kelola pendidikan yang belum optimal. Ketimpangan jumlah sekolah antara jenjang SD negeri dan SMP negeri menyebabkan sebagian lulusan SD negeri tidak dapat tertampung di SMP negeri, sehingga banyak murid yang harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta dengan biaya yang relatif lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Selain itu, faktor kesenjangan fasilitas pendidikan, distribusi tenaga pendidik yang belum merata, serta lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan dana pendidikan turut memengaruhi kualitas dan pemerataan pendidikan di wilayah tersebut. Praktik penyalahgunaan dana pendidikan dan lemahnya tata kelola pendidikan dapat menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan yang seharusnya mendukung terciptanya kesempatan belajar yang setara bagi seluruh murid.

Di sisi lain, pemerintah Kota Tangerang Selatan telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui peningkatan alokasi anggaran pendidikan, penyediaan program beasiswa bagi murid yang tidak tertampung di sekolah negeri, serta penyelenggaraan program peningkatan kompetensi guru. Kebijakan sistem zonasi juga menjadi salah satu strategi untuk mendorong pemerataan akses pendidikan. Dengan berbagai kebijakan tersebut, diharapkan pemerataan pendidikan di Kota Tangerang Selatan dapat terus ditingkatkan sehingga mampu menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat..

---

**REFERENSI**

- Alfaqi, M. Z. (2016). Mendorong peran pemuda dalam pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 1(1), 19-24.
- Choirul, D. (2023, Desember 7). Soroti masalah pendidikan di tangsel, caleg perindo: jumlah sd dan smp negeri terjadi ketimpangan. *Sindo News*.  
<https://metro.sindonews.com/newsread/1271029/170/soroti-masalah-pendidikan-di-tangsel-caleg-perindo-jumlah-sd-dan-smp-negeri-terjadi-ketimpangan-1701947560>
- Deniansyah, R. (2023, Mei 11). Cetak generasi unggul di masa depan, Pemkot tangsel berupaya tingkatkan kualitas pendidikan. *Tangselpos*. <https://tangselpos.id/detail/10743/cetak-generasi-unggul-di-masa-depan-pemkot-tangsel-berupaya-tingkatkan-kualitas-pendidikan>
- Ginting, E.V., R.R. Ginting., dan R.J. Hasibuhan., Analisis faktor tidak meratanya pendidikan di sdn 0704 sungai korang. *Jurnal Pendidikan Indonesia*. 1 (1):18-22.
- Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1).
- Hidayat, Q. (2023, November 26). Hari jadi ke-15 tangsel, isu pendidikan dan ekonomi jadi utama. *Megapolitan OkeZone*.  
<https://megapolitan.okezone.com/amp/2023/11/26/338/2927561/hari-jadi-ke-15-tangsel-isu-pendidikan-dan-ekonomi-jadi-fokus-utama>
- Ismail, S., Suhana, S., & Zakiah, Q. Y. (2020). Analisis kebijakan penguatan pendidikan karakter dalam mewujudkan pelajar pancasila di sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 76-84.
- Iskandar, D.T. (2019, Juni 5). Pengaruh sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (ppdb) terhadap tata ruang kota tangerang selatan. *Handal Selaras*.<https://www.handalselaras.com/pengaruh-sistem-zonasi-penerimaan-pelajar-di-ruang-kota-tangerang-selatan/>
- Komisi, X. (2019, Mei 24). Pendidikan tangsel harus dapat perhatian. *Dpr go*.  
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/24799/t/javascript>
- Larasati, M. (2022). KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 2(5), 709-714.
- Lievena, N. (2013). Pentingnya sistem pemerataan pendidikan di indonesia. *Pentingnya Evaluasi Program di Institusi Pendidikan*. 2(3), 227-234.
- Rifa'i, B. (2023, Januari 18). Eks kepek di tangsel dituntut 3 tahun 8 bulan bui kasus korupsi rp 699 juta. *Sindo News*. <https://news.detik.com/berita/d-6522486/eks-kepek-di-tangsel-dituntut-3-tahun-8-bulan-bui-kasus-korupsi-rp-699-juta/amp>
- Rohani, I. (2020). Kajian kebijakan pendidikan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional. *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education*, 1(01), 80-99.
- Rosikah, C. D., & Listianingsih, D. M. (2022). Pendidikan antikorupsi: Kajian antikorupsi teori dan praktik. *Sinar Grafika*.
- Wahyudi, L. E., Mulyana, A., Dhiaz, A., Ghandari, D., Dinata, Z. P., Fitoriq, M., & Hasyim, M. N. (2022). Mengukur kualitas pendidikan di Indonesia. *Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies*, 1(1), 18-22.